

ISU-ISU AKTUAL PENELITIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh:
Taufik Hidayat

**Makalah dipresentasikan pada Semiloka Penelitian dan Penulisan Tesis
pada Program Magister Sains Administrasi Pembangunan
Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat
Banjarbaru, 18 September 2010**

ISU-ISU AKTUAL PENELITIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ¹⁾

Oleh : Taufik Hidayat ²⁾

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan model pembangunan alternatif yang berkembang sebagai gerakan perlawanan terhadap hegemoni developmentalisme yang mengusung modernisasi sebagai konsep utamanya. Pembangunan ekonomi yang menjadi landasan dan doktrin utama developmentalisme (modernisasi) dianggap gagal karena seyogyanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diikuti dengan menurunnya penduduk miskin melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan (*trickle down effect*). Kenyataan yang terjadi, justru pembangunan yang dilaksanakan menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat.

Ketimpangan struktur sosial masyarakat telah menciptakan kelompok-kelompok yang lapisan bawah yang semakin terjauhkan dalam proses pembangunan. Program-program pembangunan yang diupayakan untuk mengangkat mereka dari keterpurukan ternyata seringkali tidak memecahkan akar permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini karena program-program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, insidental, parsial, dan bersifat *charity* sehingga semakin membuat mereka tergantung dengan bantuan pemerintah. Di sisi lain, model pembangunan yang mengusung pertumbuhan (*progrowth*) ekonomi, para perencana dan pelaksana pembangunan lebih berorientasi pada pencapaian hasil secara kuantitatif sesuai target yang telah ditetapkan.

-
- 1) Disampaikan pada Semiloka Penelitian dan Penulisan Tesis dalam rangka Harlah ke-3 Program MSAP Unlam, Banjarbaru, 18 September 2010
 - 2) Sekretaris Akademik Program MSAP Unlam, Staf Pengajar Fakultas Pertanian Unlam.

Model pembangunan alternatif yang mengusung pemberdayaan masyarakat menekankan pada upaya membangun *power* yang dimiliki masyarakat agar mereka mampu menolong diri mereka sendiri. *Power* dapat dibangun dari masyarakat itu sendiri melalui keterlibatan pihak luar agar masyarakat memiliki kemampuan untuk terlibat dalam proses pembangunan serta menikmati hasil pembangunan tersebut. Dalam kondisi masyarakat yang benar-benar tidak berdaya (*powerless*) pemberian dan distribusi *power* perlu dilakukan agar mereka mampu memiliki aset dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan.

Berbagai dinamika dalam proses pemberdayaan masyarakat memberikan 'lahan' yang luas bagi penelitian mahasiswa Program MSAP Unlam, terutama yang mengambil konsentrasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan pemerintah dalam dasawarsa terakhir, baik berupa program nasional maupun program pemerintah daerah. Bagaimana proses ini berlangsung dan dampaknya terhadap kehidupan, terutama kesejahteraan masyarakat merupakan isu-isu penting yang dapat dijadikan sebagai tema penelitian.

Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan

Munculnya istilah pemberdayaan (*empowerment*) sekitar akhir periode 1980-an pada hakikatnya dilatarbelakangi oleh adanya kelompok yang tidak memiliki daya (*powerless*) sehingga mereka harus diberi kekuatan dari luar agar kembali mampu memiliki daya untuk menolong dirinya sendiri. Konsep ini merupakan suatu bentuk kritik terhadap model pembangunan yang dianggap telah menciptakan ketimpangan sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan masyarakat. Jim Ife (2002) memberikan definis pemberdayaan sebagai berikut :

"empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community"

Konsep pemberdayaan ini berkaitan dengan pemberian daya (*power*) kepada individu atau kelompok agar dapat mereka gunakan dalam melakukan tindakan dan mendistribusikannya kembali pihak yang tidak memiliki. Dalam konteks ini jelas

bahwa dalam proses pemberdayaan tersebut terjadi keberlanjutan distribusi daya dari satu pihak ke pihak lainnya sehingga semua anggota akan memiliki daya. Ruang lingkup tindakan atau aktivitas dalam pemberdayaan ini mencakup semua aspek kehidupan manusia.

Dalam pengertian lainnya ditegaskan oleh Shardlow (1998) dalam Adi (2003), bahwa pengertian pemberdayaan pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Begitu juga halnya dengan Suhendra (2006) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah pemberian dan penyebaran daya kepada masyarakat agar mereka mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya sendiri dalam semua aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan sebagainya. Berdasarkan konsep ini, pada hakikatnya pemberdayaan menekankan pada upaya bagaimana masyarakat yang tidak berdaya, mampu mengembangkan keberdayaannya dengan kemampuan yang dimiliki, pihak luar lebih bersifat sebagai katalisator yang memberikan keleluasaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Oleh karena itu, makna pemberdayaan masyarakat pada dasarnya memberikan dan mendistribusikan kekuatan agar masyarakat mampu mandiri untuk bangkit mengatasi kekurangan dan kelemahannya baik pada level individu maupun kelompok. Pemberdayaan juga meliputi penguatan pranata-pranatanya sehingga dalam kegiatan pembangunan mereka mampu berperan aktif sebagai subyek pembangunan. Agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara efektif, maka reformasi kenegaraan harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat berinteraksi secara efektif dengan pemerintah

Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan menekankan pada otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Sumodiningrat, 2007). Pandangan ini menunjukkan bahwa

proses pemberdayaan merupakan sebuah proses *depowerment* dari sistem kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi, dan militer). Doktrin konsep ini berlandaskan ideal manusia dan kemanusiaan (humanisme) sehingga menurut Hikmat (2004) mirip dengan aliran neo-Marxisme, Freudianisme, dan Sosiologi Kritik yang menolak industrialisasi, kapitalisme dan teknologi. Dalam pandangan doktrin ini, ketiga hal tersebut (industrialisasi, kapitalisme dan teknologi) dianggap dapat mematikan manusia dan kemanusiaan.

Dalam perspektif politis, Ife (2002) menyatakan bahwa pemberdayaan berhubungan dengan usaha untuk memahami sifat power dalam masyarakat modern dan dapat dibagi ke dalam empat perspektif : pluralis, elit, struktural, dan post-struktural. Khusus dalam perspektif elit, pemberdayaan memerlukan tidak hanya kemampuan pengetahuan berkompetisi bagi kekuatan politik tetapi juga keterlibatan dalam sebuah permainan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh elit politik. Proses pemberdayaan dalam perspektif elit ini dapat dilakukan dalam tiga cara, yakni: (a) bergabung dengan mereka dengan tujuan untuk merubah atau mempengaruhi elit; (b) mencoba melakukan aliansi dengan elit untuk mengejar satu atau beberapa tujuan, dan (c) mencoba untuk mengurangi kekuatan elit melalui perubahan fundamental.

Konsep pemberdayaan tidak hanya pada aras individu, tetapi juga secara kolektif. Karena itu menurut Pranarka dan Vidyandika (1996), konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif-efisien secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional, pada bidang politik, ekonomi, hukum, dan lainnya.

Dalam konteks lain, Sumodiningrat (2007) memandang bahwa konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi pada tingkat ideologis maupun praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sementara pada tingkat praksis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi yang terjadi lewat pertarungan antar otonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep pemberdayaan mengandung makna keberpihakan pada masyarakat sebagai kelompok yang tidak memiliki keberdayaan.

Berdasarkan berbagai konsep yang dikemukakan di atas terdapat dua kunci utama dalam prinsip pemberdayaan masyarakat, yakni : distribusi *power* yang berkeadilan dan keberpihakan kepada masyarakat. Distribusi *power* dari pihak elit kepada masyarakat yang dianggap tidak memiliki keberdayaan merupakan strategi utama yang harus dilakukan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki keberdayaan merupakan sasaran utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Mereka terpuruk dalam ketidakberdayaan karena keterbatasan akses dan aset pembangunan. Bagaimana membuat mereka dapat mengakses berbagai kegiatan pembangunan serta kemampuan penguasaan akses pembangunan merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan Pemberdayaan

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*), agar mereka mampu berusaha sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut Payne (1997) proses pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh kekuatan dalam memutuskan dan menentukan tindakan yang akan diambil dengan cara mengurangi dampak sosial atau hambatan pribadi. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan yang ada dan melalui transfer kekuatan dari lingkungan masyarakat.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan dan bukan sebagai obyek dalam setiap kegiatan atau proyek pembangunan. Oleh karena itu agar kegiatan pemberdayaan ini dapat mencapai tujuannya maka harus diciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dalam hal ini termasuk berbagai pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat yang sudah terbukti mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Selain itu juga perlu langkah nyata dalam penyediaan berbagai input serta memberikan akses dan peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdaya, yakni dengan memberikan kepercayaan kepada mereka dalam mengelola input dan peluang tersebut. Hal yang

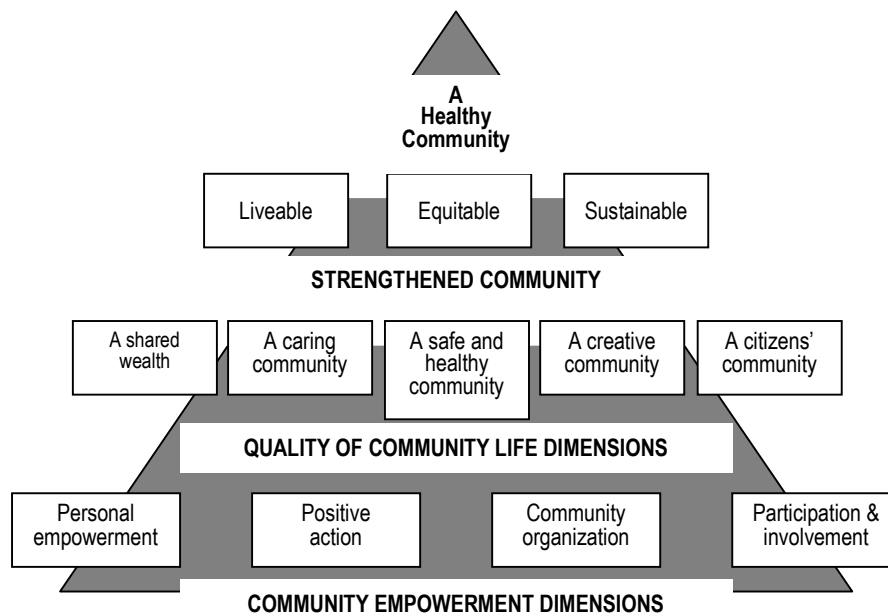
paling penting adalah upaya memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat yang lemah.

Menurut Ledwith (2005), terdapat empat dimensi yang menjadi dasar dalam upaya pemberdayaan suatu komunitas, yakni : (i) pemberdayaan personal melalui pembelajaran, pengetahuan, kepercayaan diri, dan skill; (ii) aksi positif yang terkait dengan kemiskinan, kesehatan, ras, gender, ketidakmampuan/cacat, serta aspek-aspek diskriminasi yang menentang struktur kekuasaan; (iii) organisasi komunitas yang menyangkut kualitas dan keefektifan kelompok komunitas serta hubungan masing-masing kelompok dan dengan pihak luar; (iv) partisipasi dan keterlibatan untuk menuju perubahan komunitas ke arah yang lebih baik.

Isu-Isu dalam Penelitian Pemberdayaan Masyarakat

Mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat di atas, maka terdapat berbagai ranah kajian yang dapat dijadikan sebagai isu penelitian. Ranah kajian ini dapat ditinjau dari dimensi-dimensi yang terdapat dalam proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ledwith (2005) mengemukakan ada empat dimensi yang dalam pemberdayaan masyarakat, yakni (1) pemberdayaan personal yang meliputi pembelajaran secara individual, pengetahuan, kepercayaan diri dan skill; (2) aksi positif mencakup kegiatan yang berhubungan dengan kemiskinan, kesehatan, ras, gender, ketidakmampuan dan berbagai aspek diskriminasi struktur kekuasaan yang dominan; (3) organisasi kemasyarakatan, mencakup jarak, kualitas dan keefektifan kelompok masyarakat, hubungan satu sama lain serta dengan lingkungan yang lebih luas lagi; dan (4) partisipasi serta keikutsertaan dalam mensukseskan perubahan dalam masyarakat.

Mengacu pada pandangan Ledwith di atas, keempat dimensi dalam pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi dasar dalam upaya pengembangan masyarakat. Barr dan Hashagen (2000) dalam Ledwith (2005) membuat indikator untuk mengevaluasi pengembangan masyarakat yang disebut model ABCD model, dimana keempat dimensi pemberdayaan masyarakat ini menjadi dasar utamanya (Gambar 1).



Gambar 1. Model ABCD dalam evaluasi model pengembangan masyarakat

Model di atas memperlihatkan bahwa keempat dimensi dalam pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi pijakan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (masyarakat yang sehat). Bertolak dari pandangan ini maka banyak hal yang bisa dijadikan isu penelitian tentang pemberdayaan masyarakat. Masalah kemandirian masyarakat merupakan isu yang sangat kompatibel dengan pemberdayaan. Apakah benar pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menciptakan ketergantungan dan ketidakmandirian masyarakat. Ataukah ketidakberdayaan yang membuat mereka selalu mengharapkan uluran tangan dan bantuan pemerintah. Persinggungannya program-program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan pemerintah (seperti Program IDT, P3DT, PPK, Agropolitan, Minapolitan, Desa Mandiri Pangan, DPM-LUEP, PUAP, dan lain-lain) dengan keempat dimensi di atas juga merupakan isu aktual yang dapat diteliti mahasiswa Program MSAP Unlam.

Pada hakikatnya penelitian yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat merupakan kajian terhadap upaya membangun kemampuan (*capacity building*)

masyarakat dan memberdayakan sumberdaya manusia melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan. Dalam konteks peranan kelembagaan lokal dan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan isu aktual untuk kegiatan penelitian. Pada berbagai kasus sering terjadi bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak berhasil mengembangkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat karena tidak memperhatikan atau melibatkan kelembagaan lokal masyarakat setempat.

Kajian terhadap pemberdayaan masyarakat ini dapat ditelaah pada dimensi psikologis maupun struktural. Dimensi psikologis ini menekankan pada unsur kepercayaan diri (*trust*), kontrol diri dan solidaritas yang tumbuh dalam diri atau masyarakat. Di sisi lain aras kajian pemberdayaan masyarakat ini dapat bersifat personal maupun masyarakat. Hubungan antara dimensi dan aras pemberdayaan ini digambarkan oleh Zubaedi (2007) sebagai rentang pemberdayaan masyarakat ini meliputi psikologis-personal, struktural-personal, psikologis-masyarakat, dan struktural-masyarakat. Matriks keterkaitan dimensi dan aras pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks hubungan dimensi dan aras pemberdayaan masyarakat

Aras	Dimensi	
	Psikologis	Struktural
Personal	Mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri	Membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya
Masyarakat	Menumbuhkan rasa memiliki, gotong royong, <i>mutual trust</i> , kemitraan, kebersamaan solidaritas sosial, dan visi kolektif masyarakat	Mengorganisasi masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi dalam pembangunan

Sumber : Zubaedi (2007).

Berdasarkan hubungan antara dimensi dan aras pemberdayaan tersebut, pemberdayaan dari sisi struktural-masyarakat merupakan bentuk yang paling krusial karena menyangkut aspek yang luas serta berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada ranah ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan berpengaruh luas terhadap tumbuhnya kemandirian dan keberdayaan masing-masing anggota masyarakat.

Kondisi Eksisting Penelitian Pemberdayaan Masyarakat di Program MSAP Unlam

Penelitian mahasiswa Program MSAP yang memilih kekhususan manajemen pemberdayaan masyarakat jika ditinjau dari dimensi pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan Ledwith lebih didominasi pada dimensi tentang partisipasi masyarakat. Penelitian-penelitian ini lebih bersifat evaluatif terhadap berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan telaahan terhadap 15 penelitian mahasiswa MSAP yang memilih konsentrasi manajemen pemberdayaan masyarakat tersebut berdasarkan sebaran kategori dimensinya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Penelitian mahasiswa Program MSAP berdasarkan sebaran dimensi pemberdayaan masyarakat

Dimensi pemberdayaan	Jumlah penelitian (buah)
<i>Personal empowerment</i>	1
<i>Positive action</i>	3
<i>Community organization</i>	3
<i>Participation and involvement</i>	6
Jumlah	15

Sumber : Abstrak tesis mahasiswa MSAP, Yudisium semester ganjil dan semester genap 2009-2010

Selanjutnya jika penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa MSAP tersebut dikategorikan berdasarkan dimensi dan aras pemberdayaannya maka hampir semuanya merupakan penelitian pemberdayaan masyarakat dari sisi struktural-

masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena pada sisi ini merupakan kondisi krusial yang menjadi fokus utama dalam pemberdayaan masyarakat. Hanya terdapat satu penelitian yang menitikberatkan pada sisi psikologis-personal. Untuk aras psikologis-masyarakat dan struktural-personal masih belum ada mahasiswa yang menelitinya. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Penelitian mahasiswa Program MSAP berdasarkan aras dan dimensi pemberdayaan masyarakat

Aras	Dimensi	
	Psikologis	Struktural
Personal	1	0
Masyarakat	0	12

Sumber : Abstrak tesis mahasiswa MSAP, Yudisium semester ganjil dan semester genap 2009-2010

Penutup

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan upaya untuk membangun kesadaran dan membangkitkan serta memberikan *power* kepada masyarakat/individu sehingga mereka mampu mengembangkan potensi yang ada untuk membangun diri dan masyarakatnya dalam mencapai tujuan. Isu-isu aktual dalam penelitian pemberdayaan masyarakat mencakup dimensi yang luas dari aras personal hingga masyarakat. Agar tidak terkesan sebagai penelitian yang berulang dengan isu atau topik yang sama (replikasi) maka penelitian pada sisi personal perlu digali lebih banyak sehingga kajian tentang pemberdayaan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan sumbangan baik secara praktis maupun teoritis.

Daftar Pustaka

- Adi, IR. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hikmat, H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Ifi, J. 2002. *Community Development*. . New South Wales: Pearson Education Australia Pty Limited
- Ledwith, M. 2005. *Community Development. A Critical Approach*. Bristol UK. The Policy Press University of Bristol.
- Payne, M. 1997. *Modern Social Work Theory*. Second Edition. London: Macmillan Press Ltd.
- Pranarka, A.M.W. dan Vidyandika. 1996. *Pemberdayaan. dalam* Onny, S.P dan A.M.W Pranarka (ed). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Suhendra ,K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. 2007. *Pemberdayaan Sosial. Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif. Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.